

Evaluasi Kebijakan Penataan Ruang Berupa Ruang Terbuka Hijau di Taman Suroboyo Kota Surabaya

Yatasya Aimima Margi Arum ^{1,*}; Agus Widiyarta ²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia, yatasyatasya@gmail.com;
agus_widiyarta.adneg@upnjatim.ac.id

*Correspondence : yatasyatasya@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis evaluasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau Taman Suroboyo Kota Surabaya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini menggunakan teori enam kriteria William N. Dunn (2003) diantaranya efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian yang diperoleh dari efektivitas menunjukkan sudah baik dengan ketercapaian tujuan dan realisasi yang dilakukan warga. Dari segi efisiensi kurang terlaksana dengan baik karena pada pengelolaan Taman Suroboyo kurang melibatkan warga sekitar dan mayoritas dilakukan oleh Pihak Dinas Lingkungan Hidup. Dari segi kecukupan dapat memecahkan masalah dengan cukup baik karena perekonomian dan lingkungan tempat tinggal warga secara perlahan bisa lebih baik. Dari segi perataan dapat dijelaskan bahwa kurang didistribusikan secara merata karena penyampaian informasi dan pemberitahuan dilakukan secara rapat tertutup sehingga terdapat beberapa warga yang tidak mengetahuinya. Pada indikator responsivitas dapat dikatakan bahwa warga masih memberikan tanggapan yang kurang baik karena ketidakediaan lahan pengganti untuk melakukan berbagai aktivitasnya. Pada indikator ketepatan dapat dikatakan bahwa ketepatan Taman Suroboyo sudah tepat karena telah memberikan manfaat yang berguna kepada warga dan hasil yang ada telah sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Kata kunci

*Evaluasi kebijakan,
Masyarakat, Ruang
Terbuka Hijau*

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out, describe, and analyze the evaluation of the Green Open Space policy at Suroboyo Park, Surabaya City. In this study the method used is descriptive with a qualitative approach. The focus of this study uses William N. Dunn's theory of six criteria (2003) including effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The research results obtained from the effectiveness show that it has been good with the achievement of goals and the realization carried out by public. In terms of efficiency, it is not implemented properly because the management of Suroboyo Park does not involve local public and the majority is carried out by the Department of the Environment. In terms of adequacy, it can solve the problem quite well because the economy and the environment where public live are slowly getting better. In terms of equity, it can be explained that it is not distributed evenly because the delivery of information and notifications is carried out in closed meetings so that there are some residents who do not know about it. On the responsiveness indicator, it can be said that public still give bad responses due to the unavailability of replacement land to carry out their various activities. On the appropriateness indicator, it can be said that the accuracy of Suroboyo Park is correct because it has provided.

Keywords

*Green Open Space, Policy
Evaluation, Public*

Pendahuluan

Ketergantungan hidup penduduk terhadap lingkungan yang saat ini tengah terjadi yaitu beralih fungsinya lahan-lahan kosong yang semula berisi tumbuhan pepohonan dan semak-semak menjadi tempat terbangun seperti pemukiman, pertokoan, industri, tempat rekreasi, dan lain-lain (Dwi Kusuma et al., 2020). Dalam keseimbangan ekosistem dapat dipengaruhi oleh peningkatan populasi penduduk yang sangat tinggi sehingga tekanan yang ditimbulkan menjadi sangat besar akibat ketergantungan hidup penduduk terhadap lingkungan (Tompodung et al., 2018). Aspek lingkungan perlu diperhatikan secara lebih lanjut karena memiliki dampak positif dari adanya ketersediaan lingkungan yang mencukupi. Salah satu faktor yang dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan lingkungan dalam suatu wilayah adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Bakti, 2015). Keberadaan Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat agar tercipta wilayah perkotaan yang ramah lingkungan dimana di setiap kota selalu memperhatikan kelestarian lingkungan dan menciptakan kondisi lingkungan yang nyaman bagi masyarakat agar terasa sejuk dan teduh (Sari, 2018). Ruang Terbuka Hijau sebagai salah bentuk penataan ruang yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sehingga setiap perkotaan harus memiliki. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, definisi Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang tersebut berisikan bahwa minimal pembangunan Ruang Terbuka Hijau sebesar 30% dari luas wilayah dimana komposisi terdiri dari 20% Ruang Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat.

Salah satu kota yang telah mengimplementasikan Ruang Terbuka Hijau adalah Kota Surabaya yang telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 22% (dua puluh dua persen) atau seluas 7.358,87 ha. Kondisi tersebut tidak hanya mencapai target saja, melainkan telah melampaui batas minimal yang dianjurkan oleh Pemerintah Pusat. Bentuk Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya dibedakan menjadi Ruang Terbuka Hijau alami dan Ruang Terbuka Hijau non alami. Ruang Terbuka Hijau alami berupa kawasan lindung, taman hutan raya, dan taman, serta jalur hijau. Sedangkan Ruang Terbuka Hijau non alami berupa pemakaman, lapangan dan stadion, serta telaga/waduk. Mayoritas Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Surabaya ialah taman baik taman aktif maupun taman pasif sehingga mendapat julukan sebagai Kota Seribu Taman (Irmadayanti & Anggapuspa, 2021). Keberadaan taman dan Ruang Terbuka Hijau dapat menekan dan mengurangi tingginya polusi, serta menurunkan suhu panas Kota Surabaya. Menurut Novami Sandri (2018) menyatakan bahwa ketersediaan fasilitas sosial berupa taman merupakan kebijakan dari pemerintah sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Dalam hal ini menyadari pentingnya lingkungan dan taman yang asri sebagai paru-paru kota dan

sarana rekreasi melalui kebijakan operasional berupa taman kota. Dalam kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 pasal 43. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (Bappeko Surabaya), Kota Surabaya memiliki 349 taman kota yang terdiri dari 76 taman aktif dan taman pasif memiliki jumlah sebesar 273 jalur hijau.

Menurut Febriarto (2019), taman merupakan salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau yang bersifat publik. Berdasarkan Permen PU No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, taman kota merupakan lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota. Salah satu taman yang ada di Kota Surabaya adalah Taman Suroboyo yang terletak di Jalan Pantai Kenjeran, Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak. Taman Suroboyo sebagai salah satu ruang publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota dan dikelola langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Taman Suroboyo tidak hanya sebagai taman kota saja melainkan sebagai tempat bermain, penelitian, edukasi, dan lain-lain (Dwi Rahman et al., 2018). Taman Suroboyo didesain untuk tempat berkumpul bersama orang terdekat. Taman yang diresmikan pada tahun 2019 ini oleh Tri Rismaharini ternyata menimbulkan tanggapan yang bermacam-macam dari masyarakat khususnya warga Desa Cumpat yang merupakan warga sekitar Taman Suroboyo. Adanya Taman Suroboyo ini dianggap telah menyebabkan masalah bagi warga karena telah menghilangkan lahan penjemuran ikan. Hilangnya lahan penjemuran ikan tersebut membuat penduduk sekitar kesulitan melakukan jemur ikan sehingga terpaksa menjemur ikan di pinggir jalan. Lahan yang biasanya digunakan untuk menjemur ikan dirubah atau dialihfungsikan menjadi taman. Penduduk sekitar tidak memiliki pilihan lain untuk menjemur ikan. Menurut penduduk sekitar hasil tangkapan yang dikeringkan bisa dijual dengan harga yang berkali lipat, sedangkan hasil tangkapan ikan yang dijual dalam keadaan basah dan segar hanya memiliki nilai jual yang standar sehingga penduduk sekitar gencar dalam melakukan pengeringan ikan agar mendapat keuntungan yang lebih tinggi. Namun, melihat situasi sedemikian membuat penduduk sekitar cukup sulit dalam melakukan kegiatan tersebut.

Disisi lain, aktivitas penjemuran ikan yang dilakukan di pinggir jalan oleh penduduk sekitar sangat mengganggu aktivitas pengguna kendaraan bermotor yang melewatinya sehingga seringkali terjadi bentrok antar penduduk sekitar dan pengguna kendaraan bermotor. Jalan Cumpat ini sebagai salah satu jalur utama yang sering digunakan penduduk untuk mobilitas. Jika pengguna jalan khususnya wisatawan yang melewatinya untuk ke Pantai Kenjeran akan menimbulkan kesan kurang baik karena melihat banyaknya ikan yang dijemur secara sembarangan di pinggir jalan. Selain itu, penjemuran ikan yang dilakukan di pinggir jalan ini

mengeluarkan bau yang tidak sedap kepada pengguna jalan. Ketika hujan tiba membuat ikan yang tidak mengering sehingga menimbulkan bau yang amis. Keadaan yang terjadi ini membuat lingkungan tampak kumuh dan bau. Dalam hal ini penduduk sekitar merasa hak dalam melakukan aktivitasnya direbut oleh pemerintah sehingga tidak bisa melakukan kegiatan perekonomiannya. Pemerintah Kota dianggap telah mengabaikan dan mengorbankan kepentingan penduduk setempat dengan adanya Taman Suroboyo tersebut. Kondisi yang terjadi sangat krusial karena dapat menghambat kegiatan perekonomian penduduk sekitar sebab mata pencaharian penduduk mayoritas sebagai nelayan. Pembuatan lahan penjemuran ikan harus diprioritaskan oleh Pemerintah Kota agar lingkungan Desa Cumpat, Kelurahan Kedung Cowek terlihat semakin bersih. Lahan penjemuran ini sebagai tempat dan salah satu aset untuk menggerakkan perekonomian penduduk sekitar, jika tidak segera diatasi maka roda ekonomi akan tidak berjalan dengan lancar.

Tidak hanya lahan penjemuran ikan saja yang hilang tetapi tempat untuk melakukan olahraga bagi penduduk sekitar juga hilang karena pengalihfungsian menjadi Taman Suroboyo. Keberadaan Taman Suroboyo menyebabkan penduduk sekitar terutama anak-anak dan remaja tidak dapat melakukan aktivitas olahraga. Sebelum adanya Taman Suroboyo, lahan tersebut digunakan sebagai tempat berolahraga terutama olahraga futsal bagi anak-anak dan remaja. Setelah Taman Suroboyo diresmikan, penduduk sekitar resmi tidak memiliki fasilitas untuk melakukan olahraga. Keberadaan Taman Suroboyo membuat penduduk sekitar terutama anak-anak dan remaja tidak bisa melakukan olahraga lagi sehingga menyebabkan mereka tidak memiliki tempat untuk melakukan kegiatan produktif. Anak-anak dan remaja yang tergabung dalam Karang Taruna di RT 3 RW 2 Kelurahan Kedung Cowek terkenal karena keunggulannya dalam memenangkan lomba futsal antar kampung. Namun, lapangan futsal yang biasa digunakan untuk pertandingan dan latihan telah dialihfungsikan menjadi Taman Suroboyo sehingga jika ingin melakukan olahraga futsal pemuda Karang Taruna harus menyewa lapangan futsal dan jika ingin latihan futsal di tempat yang gratis maka harus bergantian dengan tim futsal dari kampung lain. Penduduk sekitar telah mengajukan kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk diberikan fasilitas olahraga berupa lapangan futsal, namun hingga saat ini masih tidak ada kejelasan lebih lanjut. Sebelumnya pemerintah telah mengatakan bahwa dapat dibangun lapangan futsal ketika ada tanah kosong, tetapi setelah ada tanah kosong malah tidak segera dibangun.

Kesulitan warga dalam beraktivitas semakin terasa jika terdapat salah satu warga yang mengadakan acara hajatan dan tidak memiliki tempat yang bisa digunakan untuk mengadakan acara tersebut sehingga warga terpaksa menggunakan bahu jalan umum dengan menutup setengah bahu. Tidak hanya acara hajatan, adapula acara lomba-lomba yang diadakan oleh Karang Taruna terpaksa

dilakukan di pinggir jalan. Keterbatasan lahan yang warga rasakan membuat mereka memanfaatkan jalan umum agar tetap bisa mengadakan acara sebagai salah satu aktivitas sosialnya. Adanya Taman Suroboyo ini menyebabkan terhambatnya aktivitas sosial yang dilakukan oleh penduduk sekitar. Pembuat kebijakan harus selalu bergulat dengan kondisi yang dianggap bertentangan dengan kehidupan masyarakat sehingga menimbulkan kendala-kendala didalamnya. Oleh karena itu, setiap implementasi kebijakan perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dari adanya kebijakan tersebut.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan evaluasi kebijakan penataan ruang berupa Ruang Terbuka Hijau di Taman Suroboyo seperti penelitian yang dilakukan oleh Yunita Derby Indrawaty dan Indah Prabawati (2016) tentang Evaluasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Madiun (Studi pada Kawasan Aloon-Aloon Kota Madiun) yang menggunakan teori 6 kriteria evaluasi menurut William N. Dunn (2003). Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa pada segi efisiensi, pemerataan, dan ketepatan dinilai telah terlaksana dengan baik. Sedangkan pada segi efektivitas, kecukupan, dan responsivitas dinilai belum terlaksana secara maksimal. Dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun namun dalam pengelolaannya tetap berpedoman pada tujuan dan tugas pokok Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun karena Kota Madiun belum memiliki pedoman teknis mengenai pengelolaan Ruang Terbuka Hijau didalam Peraturan Daerah Kota Madiun (Indrawaty & Prabawati, 2016).

Adapula penelitian yang dilakukan oleh Novia Ayu Dwi Rachman, Endang Indartuti dan Nunuk Rukminingsih (2018) tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Taman Prestasi Kota Surabaya yang menggunakan teori 3 indikator William N. Dunn. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 dinilai telah terlaksana dengan baik terbukti dengan memberikan dampak positif kepada masyarakat khususnya pengunjung Taman Prestasi dengan tersedianya fasilitas-fasilitas taman yang terjaga dengan baik dan petugas taman yang selalu tanggap dengan kondisi taman (Dwi Rahman et al., 2018). Selain itu, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Kidung Sukma Dewi dan Dyah Lituhayu (2016) tentang Evaluasi Pelaksanaan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik (Taman Publik) di Kecamatan Semarang Timur Berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah implementasi penataan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Semarang Timur dinilai belum terlaksana dengan baik karena Taman Publik yang tidak mencapai target seluas 8,95 ha. Realisasi Taman Publik yang tercapai masih seluas 1,7 ha. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa kurangnya Taman Publik di Kecamatan Semarang Timur disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat yang terlibat dalam implementasi penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Semarang Timur (Dewi & Lituhayu, 2016).

Pada penelitian ini memiliki urgensi bahwa adanya Taman Suroboyo ini menimbulkan dampak kepada masyarakat khususnya penduduk sekitar dimana mereka kehilangan lahan untuk melakukan aktivitas sosialnya. Dalam hal ini perlu dievaluasi agar mengetahui apa yang menjadi penyebab dari keberadaan taman ini dianggap merugikan bagi penduduk. Berdasarkan pada penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana evaluasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Taman Suroboyo Kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis evaluasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau Taman Suroboyo Kota Surabaya. Pada penelitian ini dikaji menggunakan teori 6 kriteria William N. Dunn (2003) yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Metode

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif agar dapat menguraikan bagaimana evaluasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Taman Suroboyo sehingga bisa menjadi perbaikan kebijakan Ruang Terbuka Hijau di masa depan. Penelitian kualitatif dapat mendeskripsikan suatu fenomena dalam bentuk tulisan yang bersifat narasi, maka data dan fakta yang dikumpulkan akan berbentuk berupa kalimat atau gambar daripada angka. Fokus dalam penelitian ini menggunakan teori 6 kriteria William N. Dunn (2003) yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dengan fokus penelitian, peneliti dapat lebih mudah memilah antara data yang diperlukan dan tidak diperlukan.

Peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder (Barlian, 2016). Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Kepala Sub Koordinator Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Ketua RW 2 Kelurahan Kedung Cowek, Ketua RT 2 Kelurahan Kedung Cowek, dan penduduk asli yang sudah lama tinggal di sekitar Taman Suroboyo. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari literatur penunjang seperti buku, jurnal, dokumen, dan referensi buku lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, analisis data difokuskan pada saat proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data. Metode analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data menurut Miles dan Huberman (1984) dalam (Asnawai, Najib Husain, & Sudirman, 2022) yang didalamnya memuat beberapa langkah, yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

Hasil dan Pembahasan

Menurut Adinata (2016), tujuan dari adanya Ruang Terbuka Hijau adalah untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan. Selain itu, bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan kota dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, dan nyaman. Jumlah Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya sudah melampaui batas minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk menambah jumlah taman di kota yang terkenal akan Kota Pahlawan. Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya kembali membangun Ruang Terbuka Hijau yang berada di Surabaya Utara. Alasan pemilihan di wilayah Surabaya Utara karena Ruang Terbuka Hijau yang jumlahnya masih sedikit dan dinilai masyarakat kawasan tersebut masih panas. Pemerintah Kota Surabaya menggandeng Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam melakukan pengalihfungsian lahan menjadi Taman Suroboyo, tentunya itu semua dengan berbagai pertimbangan agar dapat berguna secara optimal sehingga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat terutama warga sekitarnya. Adanya Ruang Terbuka Hijau berupa Taman Suroboyo ini tidak hanya sekedar dijadikan sebagai area hijau tetapi juga bisa menjadi pusat aktivitas masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas kehidupannya baik dari segi perekonomian maupun sosial.

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil dan pembahasan penelitian berupa temuan lapangan berdasarkan pengamatan penulis terhadap peristiwa atau kejadian yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Dalam melengkapi kumpulan data penelitian, dilakukan dengan beberapa langkah. Penulis menggunakan observasi, wawancara dengan narasumber, dokumentasi berupa foto kegiatan yang relevan, dan dokumen atau studi pustaka dengan mempelajari buku referensi, laporan atau artikel lain yang relevan dengan objek penelitian.

Evaluasi digunakan untuk menentukan apakah kebijakan yang telah dilaksanakan dapat berhasil. Evaluasi program atau kebijakan dilihat dari apa yang sebenarnya terjadi dengan kebijakan sampai dengan apa yang terjadi setelah kebijakan tersebut diimplementasikan. Dengan kata lain, evaluasi akan mengukur keberhasilan kebijakan terhadap tujuan awalnya. Penulis dapat mengetahui dan melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Taman Suroboyo dengan menggunakan teori 6 kriteria menurut William N. Dunn berupa efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

1. Efektivitas

Efektivitas berkaitan dengan ketercapaian hasil yang diharapkan dan tujuan dari suatu tindakan didalam kebijakan. Menurut William N. Dunn dalam (Anggara, 2016) efektivitas berkenaan dengan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai. Keberhasilan kebijakan penataan ruang berupa Ruang Terbuka Hijau di Taman Suroboyo dapat dikatakan efektif apabila mencapai tujuan yang diinginkan dan ditetapkan. Efektivitas Taman Suroboyo dapat dilihat dari kesesuaian antara konsep

dan fakta di lapangan sehingga memungkinkan Taman Suroboyo bisa berjalan dengan baik sesuai tujuannya. Tujuan Taman Suroboyo ini adalah untuk membantu meningkatkan aktivitas masyarakat dan perekonomian warga sekitar sehingga kualitas hidupnya menjadi lebih baik.

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat dijelaskan bahwa adanya Taman Suroboyo telah sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Tujuan utama pengalihfungsian lahan menjadi Taman Suroboyo adalah untuk menghidupkan kembali suasana yang ada di lingkungan sekitar Desa Cumpat, serta membantu dalam peningkatan perekonomian warga sekitar. Hal ini dibuktikan dengan warga sekitar yang mau berjualan di Taman Suroboyo dan semakin harinya bisa semakin meningkat. Penjelasan tersebut sesuai dengan pendapat yang diutarakan oleh Adi Santoso selaku Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran, dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, menyatakan bahwa:

“cukup tercapai, sudah ada sebagian warga yang mau mengubah pola kehidupannya sekarang. Mereka sudah mau berusaha berjualan walaupun hanya sebatas makanan ringan kayak camilan. Tapi itu semua masih tergantung dari warganya juga mau menerima atau tidak, mau berubah atau tidak, mau berusaha atau tidak. Jadi warga harus mau berusaha dan punya kreatifitas “kalau ada taman ini saya bisa membuka usaha”. Cuma warga ini untuk SDM-nya (Sumber Daya Manusia) masih kurang, jadi warga masih sangat kurang mau berusaha, maunya dikasih/disumbang terutama dalam kebersihan. Kalau warga sadar akan lebih bersih nanti mereka yang menjual ikan akan lebih mudah mendapatkan pembeli/pengunjung.” (Wawancara 24 Juni 2023)

Ketercapaian tujuan pada penerapan Ruang Terbuka Hijau di Taman Suroboyo ini tidak langsung efektif dalam jangka pendek karena masih ada beberapa warga yang kurang berusaha dalam memanfaatkan potensi di Taman Suroboyo dan adanya pedagang dari luar wilayah kenjeran yang membuat warga sekitar tidak merasakan dampak perekonomian secara signifikan. Menurut Indrawaty & Prabawati (2016) dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat dampak yang tidak memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan gagal. Namun, terdapat kebijakan yang hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek melainkan melalui beberapa langkah. Disisi lain adanya Taman Suroboyo ini bisa membuat sekitar rumah warga menjadi lebih bersih. Hal ini setara dengan pendapat yang diutarakan oleh Musa'adah selaku Ketua RT 2 yang menyatakan bahwa:

“sudah sesuai apalagi adanya dukungan dari dua faktor yaitu dari sisi ekonomi dan sosial. Secara ekonomi bisa membantu meningkatkan perekonomian warga sekitar dengan jualan, warga sini bisa membuka lapak di sekitar taman jadi pendapatan atau pemasukan mereka jadi bertambah. Kalau dari sosialnya ya kampung sini jadi terjaga dan lebih bersih karena ada petugas yang membantu membersihkan di sekitar rumah warga.” (Wawancara 16 Juni 2023)

Dalam mencapai efektivitas diperlukan sebuah realisasi sebagai bentuk dari proses untuk mewujudkan rencana yang diinginkan. Mayoritas warga khususnya para ibu rumah tangga berjualan di sekitar Taman Suroboyo sebagai bentuk realisasi untuk meningkatkan perekonomiannya. Selain itu, para kepala rumah tangga jika

tidak berlayar juga ikut membantu dengan menyewakan perahunya untuk dinaiki pengunjung yang ingin mengelilingi laut kenjeran. Hal tersebut berdasarkan pada hasil wawancara dengan Adi Santoso selaku Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran, dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, menyatakan bahwa:

"Semenjak ada taman ini memang kesulitan untuk penjemuran ikan tapi di sisi baiknya ada beberapa warga sekitar lebih dari 20-an bisa berjualan disitu menjadi PKL (Pedagang Kaki Lima), ada yang ikut pemkot, ada yang jadi parkir. Selain itu jika nelayan libur perahunya bisa disewakan untuk wisata." (Wawancara 24 Juni 2023)

Dalam hal ini realisasi aktivitas penduduk setelah adanya pengalihfungsian lahan menjadi Taman Suroboyo telah berjalan dengan baik. Adapun kendala yang dirasakan Karang Taruna yaitu tempat parkir yang biasa mereka gunakan untuk mencari pendapatan telah diambil alih oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Dengan kendala tersebut membuat Karang Taruna tetap melakukan tukang parkir dengan memanfaatkan lahan yang berada di samping Taman Suroboyo.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis dapat dikatakan bahwa implementasi Ruang Terbuka Hijau di Taman Suroboyo telah sesuai dengan tujuan awalnya. Namun masih terdapat kekurangan dan kendala yang perlu diperbaiki agar Ruang Terbuka Hijau di Taman Suroboyo berjalan dengan maksimal. Walaupun masih terdapat kekurangan didalamnya, penduduk sekitar Taman Suroboyo tetap melakukan aktivitasnya agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan bentuk pengukuran suatu keberhasilan berdasarkan besarnya sumber daya yang dikeluarkan dalam suatu kegiatan. Efisiensi berkaitan dengan banyaknya usaha yang dibutuhkan dalam mencapai hasil dari Ruang Terbuka Hijau di Taman Suroboyo yang diinginkan. Efisiensi dapat dikatakan dengan baik apabila penggunaan sumber daya diberdayakan dengan optimal agar tujuan implementasi Ruang Terbuka Hijau di Taman Suroboyo akan tercapai. Menurut William N. Dunn dalam (Anggara, 2016) efisiensi berkenaan dengan seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi dalam penelitian ini dapat dilihat dari efisiensi sumber daya manusia. Keterlibatan warga sekitar sebagai salah satu bentuk dari efisiensi sumber daya manusia agar bisa menjaga kualitas Taman Suroboyo tetap dalam kondisi yang baik. Maka, dalam implementasi Ruang Terbuka Hijau di Taman Suroboyo perlu melibatkan warga sekitar untuk membantu dalam mengelola taman. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam mengelola dan memelihara maka keberadaan Taman Suroboyo tidak akan berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat dijelaskan bahwa membutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak agar dapat mencapai tujuan. Dalam hal ini kurangnya usaha dari segi sumber daya manusia terbukti dengan kurangnya keterlibatan dari warga sekitar dalam pengelolaan Taman Suroboyo. Kondisi ini

dapat diketahui dari wawancara dengan Rosidah selaku warga yang menyatakan bahwa:

“Warga sekitar tidak diperkerjakan di Taman Suroboyo malah orang luar kayak pegawai dari Taman Suroboyo sendiri itu bukan orang wilayah sini. Kalaupun ada cuma 1 tapi secara kesepakatan dulunya lebih banyak melibatkan warga sini.” (Wawancara 3 Juli 2023)

Pada pelaksanaannya hanya dikelola oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya saja yang dilakukan secara bergantian, warga sekitar hanya bisa berjualan. Didalam suatu kebijakan tidak bisa terlepas dari peran serta masyarakat dalam pelaksanaannya karena partisipasi masyarakat menjadi penentu keberhasilan kebijakan publik (Hayat, 2018). Adapun warga yang terlibat hanya satu orang, walaupun ada keterlibatan satu orang saja namun dalam mengelola taman masih kurang efisien karena kurang tanggap dalam tindakan. Hal ini terbukti ketika penulis melakukan pengamatan dan menemukan taman bermain terdapat kubangan air yang lebar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pihak yang terlibat dalam pengelolaan taman masih kurang perhatian terhadap kondisi taman.

3. Kecukupan

Kecukupan merupakan bentuk pengukuran tingkat kepuasan terhadap kebutuhan atau kesempatan untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Menurut William N. Dunn dalam (Anggara, 2016) kecukupan berkaitan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, dan kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Pengalihfungsian lahan menjadi Taman Suroboyo bisa dikatakan efektif apabila produktivitas atau sarana telah tersedia dan dapat mencapai tujuan. Di sisi lain diperlukan penilaian apakah tujuan yang telah tercapai bisa benar-benar mencukupi kebutuhan dalam berbagai hal. Fokus penelitian ini pada kriteria kecukupan adalah untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian hasil dari kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Taman Suroboyo, sasaran kajian pada fokus ini adalah untuk mengetahui hasil dan capaian penduduk sekitar dalam melakukan aktivitasnya setelah adanya pengalihfungsian lahan menjadi Taman Suroboyo sebagai Ruang Terbuka Hijau.

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat dijelaskan bahwa keberadaan Taman Suroboyo lebih merujuk pada aspek perekonomian karena memberikan dampak perekonomian yang baik namun tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Pemerintah Kota Surabaya bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya melakukan pengalihfungsian lahan menjadi Taman Suroboyo agar warga sekitar bisa lebih produktif tidak hanya menjemur ikan sehingga tingkat perekonomiannya bisa lebih meningkat. Sebelum terdapat Taman Suroboyo mayoritas aktivitas yang dilakukan oleh warga adalah nelayan dan menjemur ikan, kemudian setelah terdapat Taman Suroboyo masyarakat merubah aktivitasnya dengan berjualan. Pemecahan masalah bagi warga yang telah kehilangan lahan penjemuran ikan dan lapangan futsal adalah memanfaatkan peluang yang ada di Taman Suroboyo dengan berdagang sehingga warga masih memperoleh pendapatannya dengan baik. Hal ini

sesuai dengan hasil wawancara dari Musa'adah selaku Ketua RT 2, menyatakan bahwa:

“dari pendapatan adanya taman suroboyo itu sangat menguntungkan bagi warga karena perekonomian nelayan sendiri semakin menurun di tahun ini sedangkan untuk ibu-ibu yang berjualan di Taman Suroboyo itu dapat penghasilan tambahan. mereka mendapat keuntungan sekitar 400-700 ribu dari sepi sampai ramai pengunjung. Bahkan anak-anak muda sekarang juga ikut kayak jaga sewa mainan dan keuntungan sekitar 10ribu. Kalau dari sisi sosialnya adanya taman itu juga menguntungkan karena desa kita ini juga semakin bersih. Dulu itu desa kita kotor dan kumuh, banyak orang-orang buang sampah di laut sampe lautnya kotor Sekarang ada petugas yang mengambil sampah dengan bayar 10 ribu setiap rumah karena biar dipandang enak ada taman harus bersih jadi desa kita juga harus bersih.” (Wawancara 16 Juni 2023)

Adanya pengalihfungsian lahan menjadi Taman Suroboyo mengatasi permasalahan perekonomian yang dirasakan warga dimana pendapatan mereka kini menjadi meningkat dengan berjualan di taman. Taman Suroboyo sebagai tempat wisata tentunya selalu dikunjungi oleh masyarakat luas dan mereka juga membeli buah tangan dari para pedagang. Dalam hal ini mempengaruhi tingkat kesejahteraan warga yang berjualan di Taman Suroboyo karena adanya pengunjung yang membeli produk mereka. Kondisi tersebut memiliki korelasi bahwa kecukupan memiliki hubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif bisa memuaskan kebutuhan atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi (Indrawaty & Prabawati, 2016). Di sisi lain, keberadaan Taman Suroboyo membuat wilayah tempat tinggal mereka menjadi lebih bersih dan rapih sebab sebelum adanya pengalihfungsian lahan menjadi Taman Suroboyo tempat tinggal mereka terkenal dengan kotor dan kumuh. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kualitas hidup warga sekitar secara perlahan tercukupi dengan baik.

4. Perataan

Menurut William N. Dunn dalam (Anggara, 2016) menjelaskan bahwa kriteria perataan atau kesamaan (*equity*) sama dengan realita yang benar, sosial dan menunjuk pada penyampaian hasil dan usaha yang tidak memihak kepada siapapun. Artinya, kebijakan terletak pada hasil atau upaya yang merata. Kebijakan yang beroerietasi pada perataan merupakan kebijakan yang akibatnya atau usahanya secara adil didistribusikan (Indrawaty & Prabawati, 2016). Pemerataan dalam bidang kebijakan publik diartikan sebagai keadilan yang diberikan dan diperoleh oleh sasaran kebijakan publik. Pada penelitian ini perataan dilihat dari proses distribusi penyampaian informasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya kepada kelompok sasaran warga sekitar mengenai adanya pengalihfungsian lahan menjadi Taman Suroboyo sebagai Ruang Terbuka Hijau.

Penyampaian informasi ini merupakan salah satu cara yang dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui kegiatan atau peristiwa yang terjadi di wilayahnya. Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat dijelaskan bahwa penyampaian informasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya tidak dilakukan secara merata kepada semua kelompok sasaran. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya

beberapa warga yang tidak mengetahui adanya pemberitahuan terkait pengalihfungsian lahan menjadi Taman Suroboyo. Kondisi tersebut sesuai dengan pendapat Hendro Endhita selaku Kepala Sub Koordinator Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, menyatakan bahwa:

“Penyampaian informasi dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dengan melibatkan orang Pemerintah Kota Surabaya karena arahan dari Walikota. Kita juga mengajak orang dari Kecamatan, Kelurahan, pengurus kampung seperti RT dan RW, ada beberapa juga dari warga. Mereka kan ibaratnya tuan rumahnya jadi kita sebisa mungkin melibatkan semua warga dan pengurus untuk membahas pembangunan Taman Suroboyo itu.” (Wawancara 22 Juni 2023)

Hal ini disampaikan pula oleh Rosidah selaku warga yang menyatakan bahwa:

“Jadi sebelum ada pembangunan taman tidak ada penyampaian informasi yang dilakukan dari dinas terkait ke warga secara langsung. Saya juga tahunya tiba-tiba ada pembangunan disitu.” (Wawancara 3 Juli 2023)

Pendapat diatas juga setara dengan Jamilan selaku Ketua RW 2 yang menyatakan bahwa:

“Kalau omongan ga ada di warga paling ya ke RT dan RW terus pemberitahuan buat rapat mungkin. kalau ke warga secara langsung itu ga ada. mungkin staff-staff desa kayak Kelurahan, RT dan RW pasti ada itu informasi mau bangun itu pasti ada. Kalau ke warga paling dari mulut ke mulut ngomong kalo mau dibangun taman, kalau ke warga langsung itu jarang.” (Wawancara 16 Juni 2023)

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis kepada narasumber mayoritas memberikan jawaban tidak ada pemberitahuan terbuka yang ditujukan kepada warga. Penyampaian informasi kepada warga dilakukan melalui rapat tertutup yang hanya melibatkan beberapa warga sebagai perwakilan dan pengurus desa seperti Kepala Kecamatan, Kepala Kelurahan, Ketua RT dan RW. Hasil rapat yang diperoleh kemudian bisa disebarkan kepada warga lainnya karena Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya memberikan amanah kepada pengurus desa untuk meneruskan informasi. Pendistribusian informasi dilakukan secara tertutup dengan melibatkan beberapa pihak saja sehingga warga tidak mengetahui dengan jelas apa saja manfaat dan dampak yang diperoleh dari adanya pengalihfungsian lahan menjadi Taman Suroboyo.

5. Responsivitas

Responsivitas merupakan tanggapan dari masyarakat terhadap suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn dalam (Anggara, 2016) kriteria ini berkaitan dengan penilaian terhadap kepuasan masyarakat pada kebutuhan, preferensi, dan nilai dalam kelompok masyarakat. Tanggapan masyarakat dapat dirasakan dalam bentuk positif berupa dukungan maupun bentuk kurang baik berupa penolakan (Huda et al., 2021). Sasaran kajian fokus penelitian ini pada kriteria responsivitas adalah untuk mengetahui seberapa besar respon dari masyarakat terhadap kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Taman Suroboyo. Responsivitas dalam penelitian ini dapat dilihat dari pandangan penduduk ketika pertama kali dilaksanakannya pengalihfungsian lahan menjadi Taman Suroboyo dan tanggapan kepuasan mengenai adanya Taman Suroboyo.

Dalam pengalihfungsian lahan menjadi Taman Suroboyo tentunya selalu menimbulkan tanggapan yang bermacam dari masyarakat khususnya penduduk sekitar. Mereka dapat memberikan tanggapan pro dan kontra, artinya mereka memiliki kehendak untuk menerima ataupun menolak dari adanya kegiatan atau peristiwa yang terjadi di sekitar tempat tinggalnya. Apabila masyarakat memperoleh dan merasakan dampak positifnya pasti mereka akan memberikan tanggapan yang positif, sebaliknya jika ada yang kurang peduli dan tidak dapat merasakan dampak yang ditimbulkan maka akan memberikan tanggapan berupa penolakan. Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat dijelaskan bahwa saat pelaksanaan pengalihfungsian lahan menjadi Taman Suroboyo warga memberikan respon yang kurang baik berupa penolakan. Terdapat hasil wawancara dari Sulimah selaku warga yang menyatakan bahwa:

"Dulunya memang ada penolakan tapi tidak bisa berbuat apa-apa jadi orang-orang pemkot tetap membangun." (Wawancara 3 Juli 2023)

Selain itu, terdapat pendapat lain yang disampaikan oleh Musa'adah selaku RT 2 yang menyatakan bahwa:

"Penolakan pasti ada dari warga soalnya dari kabar miring kalau ada taman nanti kita ikut digusur. Jadi dulu itu banyak warga yang menolak tapi ya percuma kita menolak juga tidak responnya. Yang bikin warga menolak kan itu takutnya mereka digusur terus dipindah ke rusun. Kalau dipindah ke rusun kan tidak enak, kita susah buat melakukan apa-apa. Kebanyakan warga kita kan nelayan kalau dipindah ke rusun nanti mau berlayarnya tambah ribet, belum lagi akomodasinya apalagi kalau musim panen pasti banyak nelayan yang rebutan cari ikan di laut nanti bisa-bisa kita tidak dapat ikan kalau pindah ke rusun. Kalau disini kan enak ujung gang rumah kita udah laut." (Wawancara 16 Juni 2023)

Warga sekitar sangat menolak dengan adanya pengalihfungsian lahan menjadi Taman Suroboyo karena membuat mereka menjadi tidak memiliki lahan lagi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan. Sebelum adanya Taman Suroboyo lahan tersebut digunakan untuk melakukan berbagai aktivitasnya baik untuk menjemur ikan, olahraga futsal, maupun acara-acara lainnya. Selain itu, pengalihfungsian lahan menjadi Taman Suroboyo membuat warga diliputi rasa kekhawatiran dan kewaspadaan karena adanya rumor yang tersebar bahwa akan dilakukan penggusuran yang kemudian dipindahkan ke rusun sehingga semakin membuat mereka kesusahan dalam melakukan aktivitasnya.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya telah mengerahkan semua usahanya dalam pengalihfungsian lahan menjadi Taman Suroboyo agar dapat mensejahterakan masyarakat khususnya warga sekitar sehingga dapat merasa puas dan diuntungkan. Warga merasa puas apabila adanya Taman Suroboyo bisa memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Rasa kepuasan dan ketidakpuasan dapat diutarakan apabila warga memberikan tanggapan yang senang dan tidak senang dari besarnya harapan yang dirasakan terhadap Taman Suroboyo. Secara kepuasan dapat dilihat bahwa warga sangat kurang puas dengan adanya Taman Suroboyo ini karena tidak sesuai dengan yang diinginkan dan dibutuhkan warga. Terdapat hasil wawancara dari Rosidah selaku warga yang menyatakan bahwa:

“Tidak puas sama sekali karena tidak sesuai dengan apa yang dimau warga. Seharusnya kalau disosialisasikan dulu sebenarnya kan enak warga itu butuhnya butuh seperti apa bukan hanya langsung digusur dijadikan taman, tidak membantu perekonomian warga sekitar, terus untuk penjemuran ikan juga gitu dulukan disitu digunakan untuk penjemuran ikan sekarang tidak punya tempat penjemuran ikan sekarang jemurnya di jalan raya kan kurang efektif kurang elok dipandang kalau untuk kebersihan, katanya wilayah Surabaya Utara khususnya di kecamatan bulak nantinya akan dibuat tempat wisata, nah kalau tempat wisata malah wilayahnya tidak ditata kan malah semakin berantakan.” (Wawancara 3 Juli 2023)

Adapun tanggapan yang disampaikan oleh Ketua RT 2 dengan adanya Taman Suroboyo ini menyulitkan warga untuk melakukan aktivitas utamanya yaitu menjemur ikan karena pendapatan utama mereka berasal dari hasil tangkapan laut walaupun sekarang bisa terbantu dengan jualan di taman. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Musa'adah:

“saya kurang puas soalnya untuk penjemuran kita kesulitan, jemur di jalan-jalan juga tidak boleh terus kita harus jemur dimana. Kalau jemur di jalan diobrak-obrak Satpol PP malahan sampe diangkut ke Kecamatan ikan sama alat-alatnya. Kita sampe bilang ke Satpol PP Kecamatan kalau ga boleh jemur dipinggir tolong dikasih lahan soalnya tempat buat jemur ikan uda dibangun taman. Ada taman juga kita ga nuntut cuma tolong dikasi tempat aja. Terus kita kan minta beberapa meter ditanggung itu biar ga kelihatan di jalan biar bersih jalannya katanya itu punya pemkot kan kita cuma mengusulkan, jemur disana salah jemur disini ga boleh jadi kita mau jemur dimana. Dulu itu ada survey berapa orang yang jemur ikan terus katanya disuruh jemur diatas atap nanti dikasi apa seperti itu, kalau diatas gimana buat ngangkatnya kan ini besar panjang juga. Kalau seperti itu justru tambah keliatannya kumuh. Lapangan sepak bola anak muda sekarang tidak punya. Sebelum ada taman dulu itu kalau anak-anak main futsalnya disitu. Kasihan lagi itu sama anak karang taruna udah ngajuin lapangan dari RT dulu sampe RT sekarang tapi sampe sekarang tidak ada. bahkan dulu itu ada tempat depan koperasi anak-anak karang taruna juga maunya disitu tapi pas mengusulkan tetap saja tidak diterima jadinya kan anak-anaknya malas sekarang.” (Wawancara 16 Juni 2023)

Warga sekarang tidak memiliki lahan pengganti untuk menjemur ikan. Ketika mengajukan tempat justru malah disarankan untuk menjemur diatas atap rumah masing-masing, Hal tersebut semakin membuat warga geram karena semakin menyulitkan warga untuk menjemur ikan. Maka, warga mengambil keputusan untuk tetap menjemur ikan di pinggir jalan. Di lain sisi, para Karang Taruna juga merasakan hal yang sama dimana mereka harus kehilangan tempat untuk bermain futsal. Karang Taruna juga telah mengajukan tempat tetapi tidak mendapat persetujuan. Walaupun warga dapat meningkatkan pendapatannya dengan berjualan tetapi mereka tetap tidak bisa melakukan aktivitas lainnya. Warga kesulitan dalam menjemur ikan yang menjadi aktivitas utamanya, kesulitan mengadakan acara, dan kesulitan untuk bermain futsal. Pada indikator responsivitas hingga kini tetap memberikan tanggapan yang kurang baik sehingga adanya pengalihfungsian lahan menjadi Taman Suroboyo belum mendapatkan dukungan maksimal dan sepenuhnya dari masyarakat.

6. Ketepatan

Menurut William N. Dunn dalam (Anggara, 2016) ketepatan diukur dari hasil dan tujuan yang diinginkan sangat berguna dan bernilai. Kesesuaian antara tujuan

yang diharapkan dengan hasil dari pelaksanaan program atau kebijakan adalah keberhasilan dari program atau kebijakan tersebut. Kriteria ini mempertanyakan apakah tujuan yang diinginkan tepat untuk suatu kelompok sasaran. Ketepatan merujuk pada nilai-nilai dari tujuan program dan kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut (Huda et al., 2021). Ketepatan pada penelitian ini dapat dilihat dari manfaat yang diterima oleh warga mengenai adanya Taman Suroboyo dan perbandingan antara tujuan dengan hasil yang ada.

Pengalihfungsian lahan menjadi Taman Suroboyo dapat dianggap tepat jika tujuan yang direnakan bisa tercapai. Warga sekitar yang dapat merasakan manfaat dari Taman Suroboyo pasti akan merasakan keuntungan yang diperoleh baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat dijelaskan bahwa penerapan Ruang Terbuka Hijau di Taman Suroboyo ini memberikan peluang potensi yang dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar agar dapat lebih meningkatkan perekonomiannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Adi Santoso selaku Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran, dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup Kota Suarabaya, menyatakan bahwa

“sangat menguntungkan karena kampungnya jadi terkenal jadi orang luar kalau mau ke Taman Suroboyo ancer-ancernya (acuan) kampung Cumpat. Sejak ada taman itu kan selalu ramai, sepi nya waku covid saja. Bagi mereka yang tidak setuju mungkin pemikirannya tidak luas, belum merasakan benefit dari adanya taman karena kalau hari libur sama lebaran sangat ramai dikunjungi jadi mereka seharusnya bisa memanfaatkan untuk meningkatkan ekonominya terutama perahu wisata dan itu hanya boleh dilakukan oleh warga asli sana.” (Wawancara 24 Juni 2023)

Hal ini setara dengan yang disampaikan oleh Musa'adah selaku Ketua RT 2, sebagai berikut:

“Menurut saya ada keuntungan ada juga kerugiannya. Keuntungannya ya para istri atau ibu-ibu disini bisa manfaatin taman buat jualan, buat nambahin penghasilan mereka. Apalagi tamannya rame terus ga pernah sepi, dulu memang ramai di hari libur kayak sabtu minggu hari biasa sepi. Orang-orang sekarang tau positifnya adanya taman jadi mereka sudah kebiasaan dan menerima kondisi itu. Dilihat dari potensi itu bisa dimanfaatkan sebagai souvenir ciri khas Taman Suroboyo karena Taman Suroboyo merupakan tempat wisata jadi sangat potensial sekali. Saya juga mengusahan agar Karang Taruna bisa mengikuti pelatihan berupa sablon karena ada bantuan dari Dinsos berupa mesin cuci itu mungkin bisa digunakan kartar untuk membuka jasa. Tapi buat kerugiannya ya sampai sekarang tidak ada hak kelola buat warga.” (Wawancara 16 Juni 2023)

Warga sekitar khususnya para perempuan bisa mendapatkan keuntungan dari hasil jualan mereka karena kondisi Taman Suroboyo yang ramai pengunjung terutama ketika hari libur seperti hari Sabtu dan Minggu. Selain itu, para pemuda Karang Taruna juga bisa memanfaatkan peluang dengan melakukan pelatihan pembuatan *souvenir* khas Taman Suroboyo sehingga nantinya mereka bisa berjualan dan mendapatkan pemasukan untuk kas Karang Taruna. Disisi lain adanya Taman Suroboyo ini membuat Desa Cumpat secara tidak langsung menjadi terkenal karena memiliki jarak yang sangat dekat sejauh 220 meter sehingga menjadi acuan para pengunjung yang ingin datang ke Taman Suroboyo.

Pada perbandingan antara tujuan yang ditetapkan dengan hasil yang ada telah sesuai dengan yang diinginkan Pemerintah Kota Surabaya dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya karena secara perlahan warga mau memanfaatkan peluang yang ada di sekitar Taman Suroboyo sehingga pendapatannya bisa bertambah. Hal tersebut disampaikan oleh Hendro Endhita selaku Kepala Sub Koordinator Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, menyatakan bahwa:

“Sudah sesuai, kita bersama pemkot membangun Taman Suroboyo itu sangat melihat kondisi dari wilayah yang ada disana. Surabaya Utara kan terkenal dengan pesisir pantai jadi kita buat taman yang terintegrasi dengan pantai dan ada pusat oleh-oleh di SIB itu jadi warga disana bisa memanfaatkan untuk jualan agar mereka bisa meningkatkan perekonomiannya. Tujuan utama kita membangun taman suroboyo itu biar bisa meningkatkan perekonomian penduduk soalnya dulu itu disana seperti kota mati jadi kita berusaha menghidupkan kembali melalui Taman Suroboyo itu.”
(Wawancara 22 Juni 2023)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Taman Suroboyo Kota Surabaya, maka penulis dapat menarik kesimpulan pada indikator efektif dapat dikatakan bahwa implementasi Ruang Terbuka Hijau di Taman Suroboyo ini sudah efektif karena warga yang sudah mau berusaha untuk meningkatkan perekonomiannya dengan merealisasikannya baik berupa berjualan dan menyewakan perahunya, meskipun masih ditemukan kekurangan seperti lahan parkir yang diambil alih oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya, beberapa warga yang masih tidak mau berusaha untuk meningkatkan pendapatannya, dan adanya pedagang dari luar wilayah Cumpat. Pada indikator efisiensi dapat dikatakan kurang terlaksana secara efisien karena membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia pada pengelolaan Taman Suroboyo terbukti dalam pengelolaannya keterlibatan warga sekitar yang hanya terdapat satu orang yang dianggap kurang tanggap dalam tindakan. Pada indikator kecukupan sudah dapat memecahkan masalah dengan cukup baik karena perekonomian dan lingkungan tempat tinggal warga secara perlahan bisa lebih baik walaupun tidak signifikan. Pada indikator perataan dapat dikatakan bahwa kurang didistribusikan secara merata karena dilihat dari penyampaian informasi dan pemberitahuan terkait adanya pengalihfungsian lahan menjadi Taman Suroboyo terdapat beberapa warga yang tidak mengetahuinya karena dilakukan melalui rapat tertutup yang hanya melibatkan beberapa pihak. Pada indikator responsivitas dapat dikatakan bahwa warga masih memberikan tanggapan yang kurang baik terhadap adanya Taman Suroboyo karena ketidaksediaan lahan pengganti untuk melakukan berbagai aktivitasnya. Pada indikator ketepatan dapat dikatakan bahwa ketepatan Taman Suroboyo sudah tepat karena telah memberikan manfaat yang berguna kepada warga dan hasil yang ada telah sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Referensi

- Adinata, B. L. (2016). Manajemen Strategi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Taman Kota (Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Surabaya). *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*.
- Anggara, S. (2016). *Kebijakan Publik*. CV. Pustaka Setia Bandung.
- Asnawai, I., Najib Husain, M., & Sudirman, F. A. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Ulunambo Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali. *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, 2(2), 208. <https://doi.org/10.52423/pamarenda.v2i2.28677>
- Bakti, S. P. (2015). Implementasi Revitalisasi Bantaran Sungai Kalimas pada Taman Keputran di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 3(6).
- Barlian, E. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Satu)*. Sukabina Press.
- Dewi, K. S., & Lituhayu, D. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik (Taman Publik) di Kecamatan Semarang Timur Berdasarkan Perda Kota Semarang No 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 5(2), 1–12.
- Dwi Kusuma, R., Priyo Purnomo, E., & Nur Kasiwi, A. (2020). Analisis Upaya Kota Surabaya Untuk Mewujudkan Kota Hijau (Green City). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 13–27.
- Dwi Rahman, N. A., Indartuti, E., & Rukminingsih, N. (2018). Evaluasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Taman Prestasi Kota Surabaya. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(2), 1022–1037. <https://doi.org/10.1155/2013/704806>
- Febriarto, P. (2019). Kualitas Fungsi Sosial Terhadap Keberadaan Taman Kota Publik di Kota Surakarta. *Jurnal Space*, 1(1), 10–15.
- Hayat. (2018). Buku Kebijakan Publik. In *Intrans Publishing*. Intrans Publishing. https://www.researchgate.net/publication/335788910_Buku_Kebijakan_Publik
- Huda, S., As'ad, M. U., & Kuncoro, D. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Kota Banjarbaru. *Uniska*.
- Indrawaty, Y. D., & Prabawati, I. (2016). Evaluasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Madiun (Studi pada Kawasan Aloon-Aloon Kota Madiun). *Jurnal Publika*, 4(10), 1–8.
- Irmadayanti, A., & Anggapuspa, M. L. (2021). Perancangan Buku Edukatif Taman Bungkul Surabaya. *Jurna; Barik*, 3(1), 157–169.
- Novami Sandri, A., Suradji Muhammad, A., & Kurnianingsih, F. (2018). Analisis Fungsi Taman Kota Sebagai Ruang Publik Di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Administrasi Negara*, 1–14. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Sari, R. N. (2018). Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Berbasis Pelestarian Lingkungan di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(2), 1–13.

Tompodung, T. C. G., Rushayati, S. B., & Aidi, M. N. (2018). Efektivitas Program Adiwiyata terhadap Perilaku Ramah Lingkungan Warga Sekolah di Kota Depok. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 8, 170–177.
<https://doi.org/10.29244/jpsl.8.2.170-177>